

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya, R.dkk, 2009).

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam (*islamic economic system*), secara yuridis baru dimulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU tersebut eksistensi bank islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Pasal 6 maupun 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank islam di indonesia. Apa yang dimaksud dengan istilah “prinsip bagi hasil” itu sendiri, apa pula landasan hukum operasionalnya dan kegiatan usaha apa saja yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank tersebut, sama sekali belum ditegaskan dalam UU tersebut.(Cik Basir: 2009).

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang sesuai dengan hukum islam. Oleh sebab itu, bank dan nasabah dalam melakukan transaksi penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersikap makro maupun mikro (Ascarya: 2008).

Bank BNI Syariah sebagai bank syariah yang digerakkan oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari bank BNI Syariah. Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari bank BNI Syariah sendiri.

Adapun macam-macam produk pembiayaan pada Bank BNI Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya adalah : iB Hasanah Card, Pembiayaan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Haji iB Hasanah, Rahn Emas iB Hasanah, Multijasa iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Flexi iB Hasanah, CCF iB Hasanah, Wirausaha iB Hasanah, Tunas Usaha iB Hasanah, Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-lainnya.

Dengan layanan Syariah, Bank BNI Syariah memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad qardh dan ijarah yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu sistem

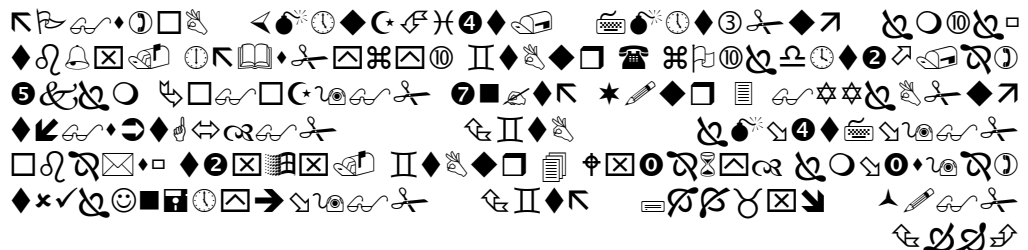
yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Produk Talangan Haji ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan atau berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Abdul Aziz dan Kustini (2007:12) mengemukakan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (istitho'ah) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya Pertama; kemampuan personal (Internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. Kedua; kemampuan umum (Eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup

menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali-Imran ayat 97 :



Artinya : *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (**BPIH**). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (**LKS**) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan BPIH.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2006:101).

Menurut Antonio,(2001:131) Secara umum Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Agustianto mingka (2013) mengatakan Dana talangan haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi *masalah* bagi banyak pihak. Multi-*masalah* artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak terkait.

Pertama, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (*takhfif*), *Takhfif* adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (*istitha'ah*) membayar sebelum keberangkatan haji. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*) secara financial, menyetujui program dana talangan haji. Fakta ini juga menunjukkan bahwa nasabah calon jamaah haji yang ditalangi bank-bank syariah adalah orang-orang yang mampu. Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan *seat* dari Kementerian Agama,

bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

Kedua, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan. Dana ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 9 tahun, maka pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasil (*yield*) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau *ujrah*. Lihatlah negara tetangga Malaysia, Tabung Haji telah menunjukkan kesuksesan yang luar biasa, bagi pembangunan ekonomi umat Islam dan bangsa dan negaranya.

Ketiga, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank BNI Syariah lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat Islam). Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah. Umat Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.

Selanjutnya yang *keempat*, dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di

Indonesia melebihi 43 juta. Selama ini bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan. Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dibesarkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh negara melalui setoran ONH dan program talangan haji, maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan bangsa. Dari uraian dan analisis di atas, jelaslah bahwa program dana talangan haji memiliki *multiplier effect* yang luar biasa bagi kemaslahatan ekonomi bangsa.

Jika dilihat dari penggunaan Akad Qardh dan ijarah pada pembiayaan talangan haji PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad Qardh ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah, dengan mengambil upah jasa (fee ujarah) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip kedua akad tersebut dan Apakah Ujarah yang telah ditetapkan oleh bank tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji maupun pindah ke ONH Plus.

Setelah melihat latar belakang masalah diatas maka tertulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap produk dana talangan haji pada PT.

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD QARD DAN IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang diatas bahwa bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru mempunyai produk dana talangan haji, maka dengan ini timbul pertanyaan :

- 1) Bagaimana penerapan Akad qardh pada produk dana talangan haji di Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru ?
- 2) Bagaimana penerapan Akad Ijarah serta fee/Ujrah pada produk dana talangan haji di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?
- 3) Bagaimana kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru terhadap banyaknya hambatan/ masalah yang terjadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Akad Qardh dan Akad Ijarah pada produk Dana Talangan Haji di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penerapan Akad Ijarah serta fee/Ujrah pada produk Dana Talangan Haji di Cabang Pekanbaru sudah sesuai atau belum dengan Fata DSN-MUI.

3. Untuk mengetahui kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru terhadap banyaknya hambatan/ masalah yang terjadi.

Manfaat Penelitian adalah :

1. Bagi Peneliti

- a. Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dana talangan haji yang dibuat oleh perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.
- b. Membantu mencari pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak bank dan sebagai bahan masukan bagi bank tersebut.

3. Bagi Pembaca

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai dana talangan haji secara luas dan detail.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian ini dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru. Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari sampai Juni 2014.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada di Bank BNI syariah Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak lain dari laporan-laporan kantor, seperti data, laporan keuangan khususnya laporan Dana Talangan Haji, keadaan geografis, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti

kepala cabang bank, karyawan bank dan customer service di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk analisa kualitatif penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis data, menghubungkan teori-teori yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya dalam memecahkan masalah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab membahas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan variable dalam penelitian ini yaitu : Bank Syariah, akad qard, akad ijarah dan Dana talangan haji.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah, struktur organisasi serta aktivitas perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berpedoman kepada teori yang ada dalam telaah.pustaka

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.